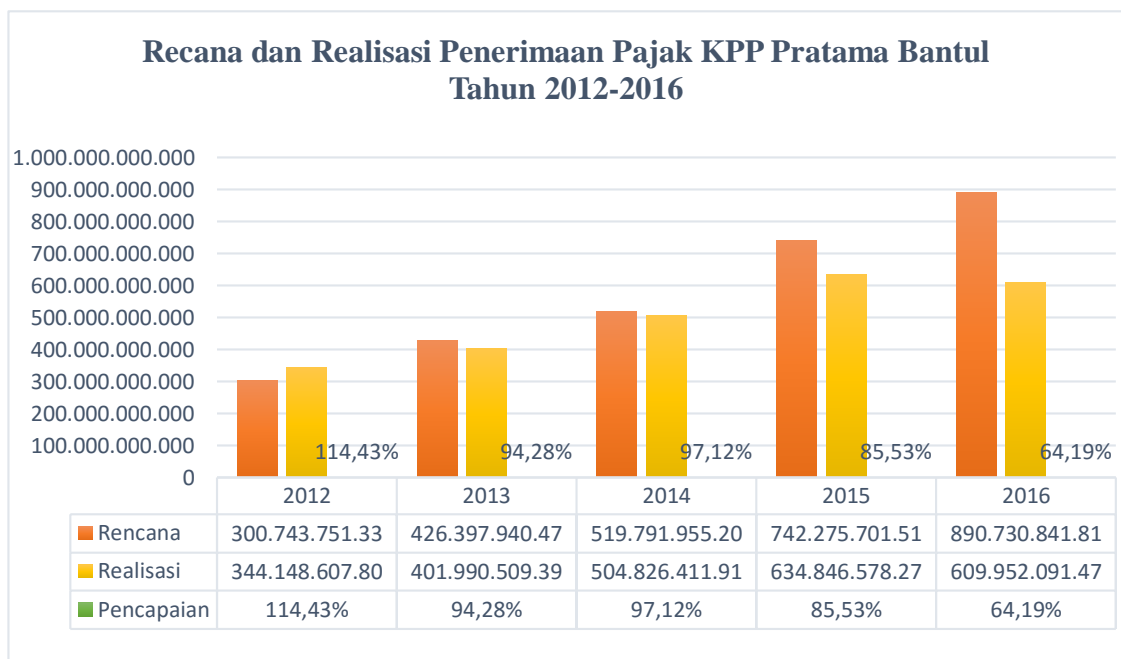


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang maju pesat karena sektor bisnis didominasi oleh unit usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor bisnis pribumi masih mendominasi. Dengan begitu, masyarakat Kabupaten Bantul memiliki campur tangan yang lebih dalam meningkatkan kemandirian wilayahnya. Kontribusi wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi semakin besar dalam mendukung pencapaian target pajak KPP Pratama Bantul. Akan tetapi, terjadi masalah pada periode pajak 2016. Realisasi penerimaan pajak turun sangat tajam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.



Gambar 4.1
Recana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantul Tahun 2012-2016

Permasalahan ini perlu dilakukan evaluasi agar menemukan titik solusi yang konkrit apabila menghadapi masalah yang sama di beberapa tahun ke depan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bantul pada tahun 2012-2016 yang diperoleh dari KPP Pratama Bantul melalui ijin instansi. Data primer diperoleh kuisisioner yang disebar kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu. Subyek penelitian ini adalah wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing*, yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Objek penelitian ini berada di KPP Pratama Bantul.

Upaya untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penyebaran kuisisioner yang berkoordinasi dengan pihak KPP Pratama Bantul. Hal tersebut dilakukan karena subyek berkriteria dan aturan-aturan tertentu yang membatasi peneliti untuk bertemu langsung dengan subyek. Dari hasil penyebaran kuisisioner, diperoleh data sebanyak 34 kuisisioner.

Tabel4.1
Data Responden Berdasarkan Bentuk Badan

BENTUK BADAN	JUMLAH	PRESENTASE
PERSEROAN TERBATAS	28	82%
YAYASAN	1	3%
BLUD	1	3%
PERGURUAN TINGGI	1	3%
PERUSAHAAN DAERAH	1	3%
BUMN	1	3%
PERSEKUTUAN KOMANDITER	1	3%
TOTAL	34	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

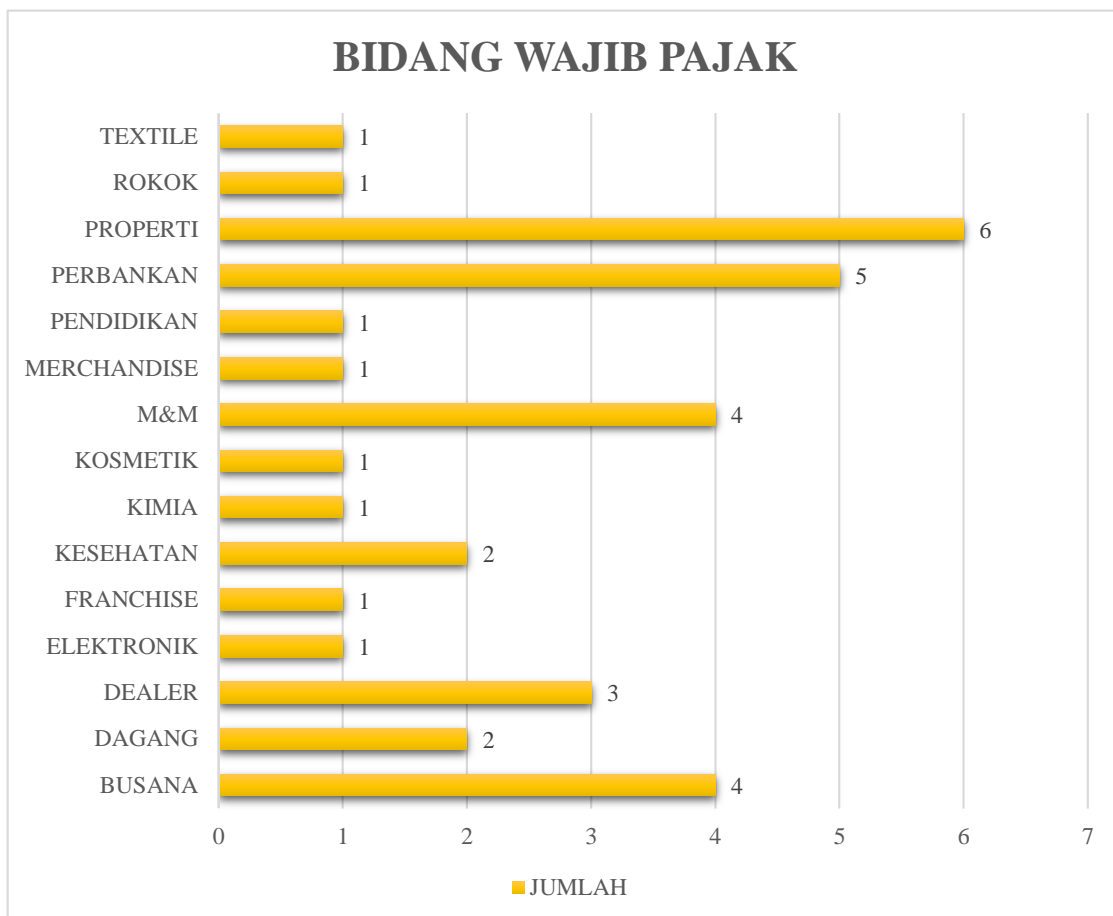
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden 28 badan atau 82% berbentuk perseroan terbatas (PT), sisanya seperti yayasan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perguruan tinggi, perusahaan daerah (PD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), persekutuan komanditer (CV) masing-masing berjumlah 1 badan atau sebesar 3%.

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Bidang/Fokus Kerja

BIDANG	JUMLAH	PRESENTASE
BUSANA	4	12%
DAGANG	2	6%
DEALER	3	9%
ELEKTRONIK	1	3%
FRANCHISE	1	3%
KESEHATAN	2	6%
KIMIA	1	3%
KOSMETIK	1	3%
M&M	4	12%
MERCHANDISE	1	3%
PENDIDIKAN	1	3%
PERBANKAN	5	15%
PROPERTI	6	18%
ROKOK	1	3%
TEXTILE	1	3%
TOTAL	34	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua responden pengguna jasa *outsourcing* bergerak pada bidang yang berbeda-beda atau tidak ada yang mendominasi. Apabila ditampilkan secara grafik sebagai berikut.



Gambar 4.2
Bidang Wajib Pajak

Dapat dilihat bahwa penulis memperoleh responden terbanyak dari bidang properti sebanyak 6 badan, kemudian dilanjutkan dengan bidang perbankan sebanyak 5 badan, makanan dan minuman (M&M) juga busana masing-masing 4 badan. Dari bidang *dealer*/penjualan kendaraan sebanyak 3 badan, bidang kesehatan dan dagang masing-masing 2 badan, sisanya seperti bidang *textile*, rokok, pendidikan, *merchandise*, kosmetik, kimia, *franchise*, dan elektronik masing-masing 1 badan.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Kepatuhan	34	6	14	20	16.56	1.878	3.527	.690	.403	-.919	.788
Kesadaran	34	9	15	24	19.18	2.181	4.756	.542	.403	.302	.788
Sanksi Perpajakan	34	7	13	20	16.15	1.877	3.523	.943	.403	-.236	.788
Kualitas Layanan	34	13	27	40	32.24	2.310	5.337	.776	.403	3.072	.788
Valid N (listwise)	34										

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kepatuhan dari 34 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai rata-rata (*mean*) 16,56 , nilai varian 3,527 dengan standar deviasi 1,878. Nilai maksimum 20 sedang nilai minimum 14 sehingga range yang didapat $20-14= 6$. Nilai kurtosis -0,919 artinya distribusi data melandai atau variannya besar sedangkan dari nilai skewness (kemencengan distribusi) 0,690, sehingga bisa disimpulkan distribusi data miring ke kiri dan berdistribusi normal.

Variabel kesadaran dari 34 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai rata-rata (*mean*) 19,18 nilai varian 4,756 dengan standar deviasi 2,181. Nilai maksimum 24 sedang nilai minimum 15 sehingga range yang didapat $24-15= 9$. Nilai kurtosis 0,302 artinya distribusi data meruncing atau

variannya kecil sedangkan dari nilai skewness (kemencengan distribusi) 0,542, sehingga bisa disimpulkan distribusi data miring ke kiri dan berdistribusi normal.

Variabel sanksi perpajakan dari 34 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai rata-rata (*mean*) 16,15, nilai varian 3,523 dengan standar deviasi 1,877. Nilai maksimum 20 sedang nilai minimum 13 sehingga range yang didapat $20-13=7$. Nilai kurtosis -0,236 artinya distribusi data melandai atau variannya besar sedangkan dari nilai skewness (kemencengan distribusi) 0,943, sehingga bisa disimpulkan distribusi data miring ke kiri dan berdistribusi normal.

Variabel kualitas layanan dari 34 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai rata-rata (*mean*) 32,24, nilai varian 5,337 dengan standar deviasi 2,310. Nilai maksimum 40 sedang nilai minimum 27 sehingga range yang didapat $40-27=13$. Nilai kurtosis 3,072 artinya distribusi data meruncing atau variannya kecil sedangkan dari nilai skewness (kemencengan distribusi) 0,776, sehingga bisa disimpulkan distribusi data miring ke kiri dan berdistribusi normal.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen. Dari hasil pengujian validitas instrumen kualitas pelayanan diperoleh hasil seperti pada tabel.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	P Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Hasil pengujian validitas instrumen kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa skor pada tiap butir pertanyaan memiliki *p value* <0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pertanyaan	P Value	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KW1	0,000	Valid
	KW2	0,000	Valid
	KW3	0,000	Valid
	KW4	0,042	Valid
	KW5	0,000	Valid
	KW6	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Hasil pengujian validitas instrumen kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa skor pada tiap butir pertanyaan memiliki *p value*

$<0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan

Variabel	Pertanyaan	P Value	Keterangan
Sanksi Perpajakan	SP1	0,000	Valid
	SP2	0,000	Valid
	SP3	0,000	Valid
	SP4	0,000	Valid
	SP5	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Hasil pengujian validitas instrumen sanksi perpajakan menunjukkan bahwa skor pada tiap butir pertanyaan memiliki *p value* $<0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan

Variabel	Pertanyaan	P Value	Keterangan
Kualitas Pelayanan	KL1	0,024	Valid
	KL2	0,000	Valid
	KL3	0,000	Valid
	KL4	0,044	Valid
	KL5	0,000	Valid
	KL6	0,000	Valid
	KL7	0,016	Valid
	KL8	0,006	Valid
	KL9	0,000	Valid
	KL10	0,001	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Hasil pengujian validitas instrumen kualitas layanan menunjukkan bahwa skor pada tiap butir pertanyaan memiliki *p value* <0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil, apabila dilakukan berulang kali dengan asumsi pada kondisi yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,05.

Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai *Cronbach Alpha* secara keseluruhan menunjukkan nilai sebesar 0,785.

Tabel 4.8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	26

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa data reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menyakinkan bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sample kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dengan dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikan 5%. Apabila angka signifikansi $> 5\%$, maka data dikatakan normal. Sebaliknya, bila angka signifikansi $< 5\%$, maka data dapat dikatakan tidak normal. Berikut adalah hasil pengolahan data uji normalitas dengan program *SPSS versi 16.0* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

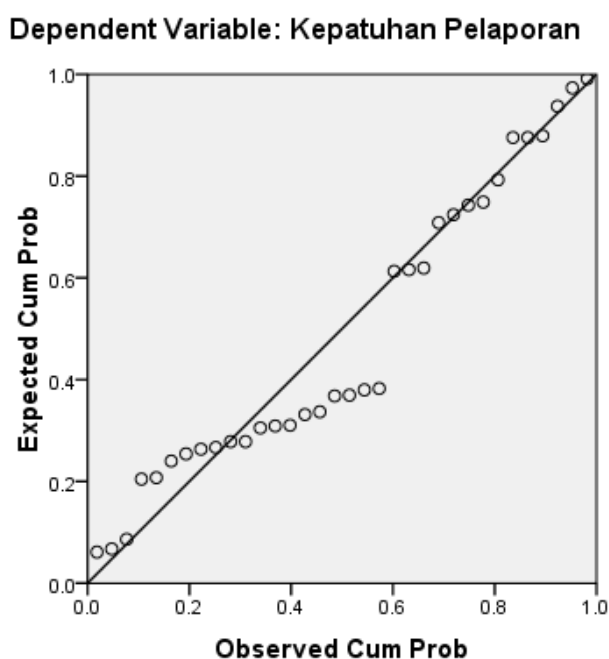
			Unstandardized Residual
N			34
Normal Parameters ^a	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.62753158
Most Extreme Differences	Absolute		.211
	Positive		.211
	Negative		-.105
Kolmogorov-Smirnov Z			1.232
Asymp. Sig. (2-tailed)			.096

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1,232 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,096. Karena signifikansi lebih dari 5% maka nilai residual tersebut adalah normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3
Grafik Normal Plot

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi uji asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* \leq 0,10 atau sama dengan $VIF \geq 10$. Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas :

Gambar 4.10
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.169	5.187		1.382	.177		
	Kesadaran	-.042	.169	-.042	-.248	.806	.867	1.153
	Sanksi Perpajakan	.505	.170	.505	2.974	.006	.868	1.152
	Kualitas Layanan	.059	.129	.072	.457	.651	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel independen (kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada

model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji *Glejser* pada program *SPSS versi 16*. Berikut ini hasil dari pengolahan data uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.714	2.678		-.267	.792
Kesadaran	-.080	.087	-.174	-.920	.365
Sanksi Perpajakan	.081	.088	.174	.921	.364
Kualitas Layanan	.063	.067	.168	.953	.348

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,365, dimana $0,365 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,364, dimana $0,364 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,348, dimana $0,348 > 0,05$. Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Hipotesis dan Analisa Data

a. Hasil Pengujian Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan analisis analisis regresi linear berganda. Simbolon (2009) mengemukakan bahwa regresi berganda terdiri dari sebuah peubah tak bebas sebagai respon atau yang diprediksi dan lebih dari satu peubah bebas sebagai prediktor atau yang memprediksi. Analisis regresi linear ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 275). Hasil uji regresi linear berganda yang telah diolah menggunakan program *SPSS versi 16* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Perpajakan, dan Kualitas
Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.169	5.187		1.382	.177		
	Kesadaran	-.042	.169	-.042	-.248	.806	.867	1.153
	Sanksi Perpajakan	.505	.170	.505	2.974	.006	.868	1.152
	Kualitas Layanan	.059	.129	.072	.457	.651	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 7,169 dan koefisien regresi kesadaran, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak masing-masing sebesar -0,042; 0,505; 0,059 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,169 - 0,042 X_1 + 0,505 X_2 + 0,059 X_3 + \varepsilon$$

Hipotesis 1 adalah tidak terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan nilai $t_{\text{-test}}$ yaitu -0,248 dengan p value 0,806. Koefisien beta kesadaran sebesar -0,042, apabila kesadaran bertambah sebesar 1, maka tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,042. Dengan demikian hipotesis 1 tidak mendukung penelitian yang secara statistik yang

dilakukan Indriyani dan Sukartha (2014) dan tidak mendukung hipotesis penelitian.

Hipotesis 2 adalah terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12. menunjukkan nilai $t_{\text{-test}}$ yaitu 2,974 dengan p value 0,006. Koefisien beta kesadaran sebesar 0,505, apabila sanksi perpajakan bertambah sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,505. Dengan demikian hipotesis 2 mendukung penelitian yang secara statistik yang dilakukan Febriyanto (2011), Indriyani dan Sukartha (2014), dan Paramartha dan Rasmini (2016) serta mendukung hipotesis penelitian.

Hipotesis 3 adalah tidak terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.12. menunjukkan nilai $t_{\text{-test}}$ yaitu 0,457 dengan p value 0,651. Koefisien beta kesadaran sebesar 0,059, apabila kualitas pelayanan bertambah sebesar 1, maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,059. Dengan demikian hipotesis 3 tidak mendukung penelitian yang secara statistik yang dilakukan Febriyanto (2011), Indriyani dan Sukartha (2014), dan Paramartha dan Rasmini (2016) serta tidak mendukung hipotesis penelitian.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan

kualitas pelayanan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan diambil dengan menetapkan α sebesar 0,05. Apabila $p\text{ value} < \alpha$ (0,05), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t tabel pada tabel 4.12. dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki $p\text{ value } 0,806 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara individu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki $p\text{ value}$ sebesar 0,006 (signifikan) karena $p\text{ value} < 0,05$ berarti variabel sanksi perpajakan secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan memiliki $p\text{ value } 0,651$ atau $p\text{ value} > 0,05$ artinya variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Adj R²

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara melihat besarnya koefisien determinasi (**Adj R²**). Besarnya koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 (nol) artinya sama sekali tidak menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai 1 (satu) berarti terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen dengan

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis tersebut dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi antar Variabel

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.138 ^a	.019	-.012	1.889
2	.492 ^a	.242	.218	1.661
3	.088 ^a	.008	-.023	1.900
a. Predictors: (Constant), Kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas layanan				

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 ^a	.249	.174	1.707

a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.13. dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R Square* masing-masing variabel untuk kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan adalah -0.012; 0.218; -0.023 Nilai ini menunjukkan bahwa kurang dari 1,2% kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bantul dipengaruhi oleh kesadaran. Sedangkan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sebesar 21,8% kepatuhan

wajib pajak di KPP Pratama Bantul dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kualitas layanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kurang dari 2,3%. Itu artinya sebesar 97,7% juga masih dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai koefisien *adjusted R Square* dari semua variabel sebesar 0,174 atau sebesar 17,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sebesar 17,4 %, sedangkan sisanya sebesar 82,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

d. Hasil Pengujian Hipotesis Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap Target pajak

Pengujian hipotesis ke 4 dilakukan dengan uji analisis *Chi Square*. Alat analisis ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji bahwa seberapa kuat korelasi antara dua variabel. Artinya analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan dengan data tidak berdistribusi normal. Prosedur *Chi Square* digunakan untuk menguji bahwa kuat atau tidak hubungan antara dua variabel. Data yang diperbandingkan adalah nilai target pajak dan realisasi penerimaan PPh badan dari periode 2014-2016.

Sebelum menguji hipotesis ke 4 ini perlu ditunjukkan kondisi yang terjadi di tahun 2016 terkait dengan pencapaian pajak dari pajak penghasilan (PPh) secara keseluruhan. Secara garis besar target pajak pada tahun 2016 adalah Rp 890.730.841.815,- seiring dengan pelaksanaannya realisasi penerimaan hanya tercapai Rp 609.952.091.470,- dan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target dan Realisasi Pajak Tahun 2016

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Pajak Penghasilan	594.032.231.049	354.504.623.411
1. PPh NON MIGAS	594.032.231.049	354.504.623.411
1.1 PPh Pasal 21	149.166.511.000	101.497.871.424
1.2 PPh Pasal 22	28.091.234.524	24.987.800.587
1.3 PPh Pasal 22 impor	2.762.371.587	3.215.445.858
1.4 PPh Pasal 23	11.378.523.623	11.810.332.367
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	29.101.390.000	5.253.476.965
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	79.126.998.835	46.467.543.274
1.7 PPh Pasal 26	61.562.300	2.143.552.126
1.8 PPh Final	294.343.639.180	124.140.126.696
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	34.988.474.114
2. PPh MIGAS	0	326.878.285
2.1 PPh Minyak Bumi	0	326.529.250
2.2 PPh Gas Alam	0	145.785
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	203.250

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
B. PPN dan PPnBM	283.403.239.153	242.674.623.020
1. PPN Dalam Negeri	273.791.478.408	232.531.642.912
2. PPN Impor	8.935.733.994	9.741.537.509
3. PPnBM Dalam Negeri	135.729.484	392.902.421
4. PPnBM Impor	616.255	381.545
5. PPN Lainnya	517.466.863	8.158.633
6. PPnBM Lainnya	22.214.149	0
C. PBB dan PBHTB	0	0
1. Pendapatan PBB	0	0
a. PBB Pedesaan	0	0
b. PBB Perkotaan	0	0
c. PBB Perkebunan	0	0
d. PBB Kehutanan	0	0
e. PBB Pertambangan Minerba	0	0
f. PBB Migas	0	0
g. PBB Pertambangan	0	0
h. PBB Lainnya	0	0
2. Pendapatan PBHTB	0	0
D. Pendapatan PPh DTP	0	0
1. PPh Pasal 21	0	0
2. PPh Pasal 22	0	0
3. PPh Pasal 22 impor	0	0
4. PPh Pasal 23	0	0
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
7. PPh Pasal 26	0	0
8. PPh Final	0	0
9. PPh Non Migas Lainnya DTP	0	0
E. Pajak Lainnya	13.295.371.613	12.445.966.754
1. Bea Materai	6.790.732.060	3.851.680.000
2. Penjualan Benda Materai	6.504.639.553	5.276.400.000
3. PTLL	0	53.583.681
4. Bunga Penagihan PPh	0	2.000.850.950
5. Bunga Penagihan PPN	0	29.034.587
6. Bunga Penagihan PPnBM	0	1.234.687.536
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0
8. PIB	0	0
9. PPN Batu Bara	0	0
Jumlah (A+B+C+D+E)	890.730.841.815	609.625.213.185

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Dari tabel 4.16. diatas dapat dilihat secara detail teknis pencapaian dari target pajak yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Bantul. Dapat dilihat juga bahwa penerimaan terbesar berasal dari sektor Pajak Penghasilan. Akan tetapi, untuk menjawab hipotesis pengaruh realisasi penerimaan PPh Badan terhadap target penerimaan pajak maka harus diukur dengan rasio efisiensi administratif (AER).

$$\text{Rasio Efisiensi Administratif (AER)} = \frac{\text{Realisasi (R)}}{\text{Target (T)}} \times 100 \%$$

Tabel 4.16
Rasio Efisiensi Administratif Pajak Penghasilan Tahun 2016

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	AER
Pajak Penghasilan	594.032.231.049	354.504.623.411	60%
1. PPh NON MIGAS	594.032.231.049	354.504.623.411	60%
1.1 PPh Pasal 21	149.166.511.000	101.497.871.424	68%
1.2 PPh Pasal 22	28.091.234.524	24.987.800.587	89%
1.3 PPh Pasal 22 impor	2.762.371.587	3.215.445.858	116%
1.4 PPh Pasal 23	11.378.523.623	11.810.332.367	104%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	29.101.390.000	5.253.476.965	18%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	79.126.998.835	46.467.543.274	59%
1.7 PPh Pasal 26	61.562.300	2.143.552.126	3.482%
1.8 PPh Final	294.343.639.180	124.140.126.696	42%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	34.988.474.114	0%

Sumber : data sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PPh Badan di PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 46.467.543.274 dari target sebesar Rp 79.126.998.835 atau hanya tercapai sebesar 59 % saja. Bila diukur dengan kriteria efisiensi kinerja keuangan.

Tabel 4.17
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : *Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.3276 Tahun 1996.*

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Bila nilai AER diukur ke dalam kriteria efisiensi kinerja keuangan terlihat sangat jelas bahwa penerimaan PPh Badan di tahun 2016 tidak efektif. Setelah diketahui tingkat kinerja di tahun 2016, kemudian dilakukan uji analisis *Chi-Square* karena data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.18
Target Pajak dan Realisasi PPh Badan Tahun 2014-2016

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi PPh Badan (Rp)
2014	519.791.955.205	47.448.763.740
2015	742.275.701.512	58.814.136.233
2016	890.730.841.815	46.467.543.274

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2018

Dari tabel 4.18 kemudian diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.19

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.000 ^a	4	.199
Likelihood Ratio	6.592	4	.159
Linear-by-Linear Association	.004	1	.951
N of Valid Cases	3		

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2018

Dari hasil uji *Chi-Square Tests* antara target pajak dengan realisasi PPh Badan, diperoleh hasil bahwa nilai *Pearson Chi-Square* sebesar 0,199. Hasil tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara realisasi penerimaan PPh Badan dengan target pajak sangat lemah. Kesimpulannya bahwa hipotesis ke-4, realisasi PPh Badan berkorelasi terhadap target penerimaan pajak, namun jelas memiliki hubungan yang sangat lemah atau kurang berpengaruh terhadap upaya mencapai target pajak. Karena nilai korelasi berada antara 0 – 0,25, masuk kategori korelasi sangat lemah. Rasio efektifitas hanya tercapai sebesar 59 % atau tidak efektif. Artinya terdapat kemerosotan penerimaan PPh Badan serta penerimaannya sangat kecil pengaruhnya terhadap pencapaian target pajak di tahun 2016.